

Program Penanganan *Stunting* di Bontang Muhammad Yusuf Pastikan Mendukung Penuh



Sumber gambar:

https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20241006_Partai-PKB-DPRD-Bontang.jpg

BONTANG – Anggota DPRD Bontang Muhammad Yusuf, menegaskan komitmennya dalam mendukung program penanganan *stunting* yang saat ini kembali naik dari 18 persen menjadi, 20,6 persen akhir Agustus lalu.

Yusuf menekankan pentingnya koordinasi antara semua pemangku kepentingan untuk menurunkan angka *stunting*, terutama di kelurahan-kelurahan yang merupakan basis wilayahnya.

“Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Saya siap memberikan dukungan penuh untuk program-program yang bertujuan menurunkan angka *stunting*,” ujar Yusuf saat dihubungi TribunKaltim.co, Minggu (6/10/2024).

Ia menambahkan bahwa kunci keberhasilan penanganan *stunting* terletak pada kerja sama antara *stakeholder*, termasuk kecamatan dan dinas kesehatan.

“Koordinasi yang baik akan sangat membantu dalam mencapai target ini,” ungkapnya.

Salah satu langkah yang akan dikejar adalah memastikan ketersediaan posyandu yang memadai.

Selain itu, Yusuf menyebut DPRD Bontang berencana menggalang dukungan untuk program-program yang mendukung kesehatan anak, terutama yang berkaitan dengan peningkatan gizi dan akses terhadap layanan kesehatan. Terlebih hal tersebut adalah bagian dari tanggung jawab DPRD.

Langkah awal, menurutnya dimulai dari mengawasi alokasi anggaran yang berkaitan dengan program penanganan *stunting*, mengingat proses RAPBD 2025 akan segera

dimulai. Menurut politisi PKB ini, penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesehatan anak.

“Saya pastikan akan *plototi* itu anggaran. Jangan sampai hanya ceritanya saja,” tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Dinas Kesehatan Bontang mencatat bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan kesehatan balita di posyandu menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka *stunting*.

Dari total 16.226 balita, hanya 59,6 persen yang terdaftar mengikuti pemantauan di Posyandu. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang, Bambang Sri Mulyono, dalam wawancara beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi ini terlihat di beberapa wilayah, termasuk Kelurahan Bontang Kuala dan Tanjung Laut Indah.

“Karena masyarakat kurang antusias dengan kata lain partisipasi yang rendah, pencegahan *stunting* menjadi kurang maksimal,” ujar Bambang, Jumat (4/10/2024)

Ia menjelaskan, rendahnya partisipasi ini mencolok di sejumlah wilayah, seperti: Kelurahan Bontang Kuala (28,84 persen), Lok Tuan (38,14 persen), Tanjung Laut Indah (46,29 persen), yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka *stunting*.

Data Dinkes Bontang menunjukkan, wilayah pesisir seperti Kelurahan Bontang Lestari mencatat prevalensi *stunting* tertinggi, mencapai 35 persen dengan 166 balita dari total 431 yang terdiagnosis *stunting*.

Diikuti oleh Kelurahan Berbas Pantai dengan 27,5 persen (112 balita) dan Tanjung Laut Indah dengan 27,2 persen (122 balita). Sementara itu, Kelurahan Berebas Tengah mencatat prevalensi *stunting* 25,5 persen dengan 148 anak, dan Kelurahan Guntung berada di posisi kelima dengan 24,5 persen (107 anak balita *stunting*). Aspek geografis pesisir tampaknya menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan *stunting* di Bontang. “Ini menjadi PR besar bagi kami menjelang akhir tahun 2024,” tuturnya. (adv/mrd)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Program Penanganan *Stunting* di Bontang Muhammad Yusuf Pastikan Mendukung Penuh, 07/10/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres 72/2021), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah

standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Dalam Pasal 2 Perpres 72/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.
 - (2) Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
3. Diatur dalam Pasal 5 Perpres 72/2021 sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *stunting* target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
 - (2) Target antara prevalensi *stunting* dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
 - (3) Target nasional prevalensi *stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024.